

KEBIJAKAN BUMG DALAM MENDUKUNG GAMPONG MANDIRI MELALUI KAPASITAS GAMPONG WISATA MANEE KAREUNG KOTA LHOKSEUMAWE

Nurmasyahyati¹, Fidhia Aruni², Ratna Farida³, Nurzamli⁴

STIA Nasional, Lhokseumawe

anazahara92@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan BUMG dalam mendukung gampong mandiri melalui peningkatan kapasitas gampong wisata Manee Kareung di Kota Lhokseumawe. Wisata menjadi fokus penelitian. Sumber data yang diperoleh melalui studi literasi yang tersedia secara online dan offline, seperti jurnal ilmiah, buku, dan berita dari sumber terpercaya. BUMG merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong terciptanya peningkatan ekonomi bagi Warga desa atau gampong berdasarkan ragam potensi yang dimiliki dan pengurus BUMG harus mampu mengelola serta mengembangkan usaha dengan melihat peluang yang ada dan memahami permintaan dari masyarakat. Kebijakan BUMG di Manee Kareung mendukung kemandirian ekonomi Gampong melalui pengembangan Gampong Wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menerapkan kebijakan BUMG dalam pembangunan Gampong Hasil menunjukkan bahwa tingkat organisasi, BUMG Manee Kareung belum menunjukkan fungsional kapasitas dalam aspek kemitraan eksternal, aspek potensi pariwisata pengembangan, dan aspek promosi desa wisata. Begitupun pada aspek kepemimpinan dan koordinasi, itu menunjukkan kurangnya kapasitas serta pada individu juga belum memiliki kapasitas fungsional dalam memelopori perkembangan potensi pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, terutama mengenai kapasitas kelembagaan di tingkat sistem. Pada tingkat sistem, penelitian pada hubungan antara individu, kelompok informal, dan organisasi formal yang menghasilkan modal sosial dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Gampong terkait dengan pengembangan gampong wisata

Kata Kunci: BUMG, Gampong Wisata, Kapasitas, Kebijakan

ABSTRACT

The purpose of this study was to get an overview of BUMG policies in supporting independent gampongs through increasing the capacity of the Manee Kareung tourism gampong in Lhokseumawe City. Tourism is the focus of research. Sources of data obtained through online and offline literacy studies, such as scientific journals, books, and news from trusted sources. BUMG is one of the forces that can encourage the creation of economic improvements for villagers or gampongs based on the variety of potential they have and BUMG administrators must be able to manage and develop a business by seeing existing opportunities and understanding requests from the community. The BUMG policy in Manee Kareung supports Gampong economic independence through the development of Gampong Wisata. The research method used is descriptive qualitative. Implementing BUMG policies in Gampong development. The results show that at the organizational level, BUMG Manee Kareung has not demonstrated functional capacity in the external partnership aspect, the potential tourism development aspect, and the tourism village promotion aspect. Likewise in the aspect of leadership and coordination, it shows a lack of capacity and individuals also do not have the functional capacity to spearhead the development of

tourism potential. Therefore, this study provides several recommendations for further research, especially regarding institutional capacity at the system level. At the system level, research on the relationship between individuals, informal groups, and formal organizations that generate social capital and policies carried out by the Tourism Office and Gampong Government related to the development of tourism gampongs

Keywords: BUMG, Tourism Village, Capacity, Policy

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam mendukung kawasan untuk mencapai skala nasional, maka pemerintah berkewajiban menggali, mengelola, dan membina masyarakat untuk mencapai potensi daerah masing-masing. Dengan begitu keberadaan desa harus mendapat perhatian yang terfokus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menggunakan kebijakan terkait (Hasyem & Ferizaldi, 2022). Ini Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan menghimpun dan melembagakan ekonomi kerakyatan kegiatan. BUMDes ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa (Zakaria et al., 2022). Peraturan Pemerintah Pusat tentang Penggunaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan strategi penggunaan Dana Desa dalam peningkatan ekonomi desa melalui kegiatan BUMDes adalah memenuhi permintaan pasar lokal (Veronica Siahaan et al., 2022).

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dikuasai oleh desa melalui penanaman modal pribadi yang berasal dari kekayaan desa dan dipisahkan dalam rangka mengatur jalannya harta kekayaan, pelayanan jasa, dan lain-lain. Usaha untuk mensejahterakan masyarakat desa, menurut UU. Nomor 06 Tahun 2014 (Mansur et al., 2021). BUMDes lahir menjadi pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa, dimulai dari kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh: desa, berdasarkan desa, oleh desa, dan juga untuk desa (*Disbudpar Aceh Gelar Pelatihan Desa Wisata Di Kota Lhokseumawe, 2022.*).

Jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 57.273, berdasarkan data Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2021 (Hartono, 2021). Itu pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagai prioritas penting penggunaan dana desa diamanatkan oleh pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari UU Desa yang tertuang dalam PDDT Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pemanfaatan Desa Dana tahun 2015 dalam pasal 9, tentang pusat sasaran pemerintah, BUMDes akan tetap ditingkatkan (Hasyem & Ferizaldi, 2022). BUMDes dalam hal ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pilar perekonomian kegiatan di desa sehingga nantinya dapat berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial dengan menggunakan tujuan bersama yaitu: meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan PAD, mengembangkan potensi desa sebagai karakter desa, dan

kebutuhan masyarakat sebagai tulang punggung pertumbuhan desa dan ekuitas (Adejumo et al., 2021). Di Indonesia, pendirian BUMDes didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, dan Kepengurusan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.

Provinsi Aceh yang diistimewakan memiliki Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, diterbitkan berdasarkan amanat keistimewaan Provinsi Aceh yang disusul dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, baik yang terkait dengan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ke depan. Kedua ketentuan ini semakin memperkuat posisi BUMDes yang di Aceh dikenal dengan BUMG yang secara khusus mengakar dalam masyarakat Aceh baik secara budaya, sosial maupun ekonomi. Dengan baik diaturnya UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong mampu mengukuhkan BUMG sebagai badan usaha yang berafiliasi dengan masyarakat dengan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Junita et al., 2022).

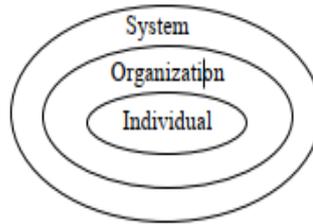
BUMG tertuang juga pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik gampong yang jelas Pada Pasal 31 dijelaskan bahwa Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik (Zakaria et al., 2022). Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 sekurang-kurangnya memuat laporan kinerja pengurus selama 1 tahun periode, kinerja usaha yang menyangkut realisasi usaha, upaya pengembangan indikator keberhasilan, laporan keuangan (Junita et al., 2022).

Tujuan pendirian BUMG agar pemberdayaan usaha dan ekonomi masyarakat berjalan, mengoptimalkan segenap sarana dan prasarana yang ada di Gampong secara optimal, menggali setiap potensi yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli gampong namun hal tersebut tidak berjalan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik gampong di Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2021.

Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong, terdapat 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Satu terdapat 11 gampong, Kecamatan Muara Dua 17 gampong, Kecamatan Blang Mangat 22 gampong dan Kecamatan Banda Sakti terdiri atas 18 gampong diantara empat Kecamatan tersebut Kecamatan Blang Mangat yang memiliki jumlah gampong terbanyak di Kota Lhokseumawe. Secara umum, Kota Lhokseumawe terletak di lokasi yang strategis untuk kawasan pariwisata. Namun, sayangnya, pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Sebagai tantangan baru, Pemkot Lhokseumawe bisa memanfaatkan banyak potensi yang ada di masing-masing Gampong. Misalnya, mengembangkan gampong wisata tentunya melalui kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah desa terlebih dahulu, karena tidak semua desa memiliki hal yang sama potensi pariwisata. Pemerintah desa memiliki kewenangan desa setempat dalam pengembangan desa wisata berkembang untuk memungut royalti atas usaha yang dikelolanya. Maka melalui kewenangan tersebut, kini daerah tersebut sudah mulai merintis dan menjadi desa wisata (Gilang et al., 2021)

Didirikan pada tahun 2020 oleh Pemerintah Gampong Manee Kareung, BUMG Wisata tengah sawah ini merupakan salah satu BUMG Kota Lhokseumawe yang berbasis potensi local masyarakat setempat. Dalam inovasinya, Pemerintah Gampong Manee Kareung dan BUMG Manee Kareung wujudkan pengembangan pariwisata desa melalui pemanfaatan lahan sawah para petani untuk dijadikan spot foto yang menarik (Junita et al., 2022).

Dalam peningkatan kapasitas gampong wisata ini, implementasi kebijakan BUMG Manee Kareung masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat gampong, namun Pemerintah Gampong masih belum mampu merangkul seluruh masyarakat dalam berpartisipasi pelaksanaan kebijakan BUMG (Zakaria et al., 2022). Hal ini menyebabkan sebagian orang kurang menyadari implementasi kebijakan BUMG di Gampong Manee Kareung sehingga menunjukkan reaksi warga yang tidak memperhatikan kebijakan BUMG sebelum pengembangan wisata sawah. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang peningkatan kapasitas kebijakan BUMG untuk mendukung perekonomian desa melalui pembangunan Wisata Sawah di Manee Kareung. Dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana proses berjalan untuk mendukung perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas Gampong wisata sawah.



Gambar 1. Institutional Capacity Level

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa perkembangan desa wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik wisata, serta infrastruktur wisata. Aspek kelembagaan adalah salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Dalam aspek kelembagaan, diperlukan kapasitas masyarakat baik berupa organisasi maupun individu sebagai yang utama pelaku pembangunan desa wisata untuk pelaksanaan pembangunan desa wisata strategi dan program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan pembangunan desa wisata. Tingkat kompetensi atau kapasitas individu dapat diukur melalui beberapa indikator (Hagelsteen et al., 2022).

Dari konsep JICA (2004) dalam (Stojic & Salhofer, 2022), indikator tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan/keterampilan, kesadaran, dan sikap. Berdasarkan indikator kapasitas individu yang diteorikan oleh para ahli, peneliti mengambil beberapa indikator kontekstual dengan pengelolaan desa wisata. Indikator ini mengacu pada Noho (2014) karena penelitiannya terkait dengan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata yaitu kesadaran dalam merintis pengembangan potensi wisata, pengetahuan konsep desa wisata, kemampuan melayani wisatawan, kemampuan mengolah oleh-oleh atau cinderamata, dan kemampuan mengelola tempat wisata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang diperoleh, diolah dan dideskripsikan (Fatimah, 2021). Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih jelas penelitian dari wawancara dan observasi tentang peningkatan kapasitas kebijakan BUMG untuk mendukung perekonomian gampong melalui pengembangan Gampong wisata Manee Kareung. Penelitian ini dilakukan di Gampong Manee Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, pada Badan Usaha Milik Gampong Manee Kareung.

Metode kualitatif ini menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Bidang observasi dan wawancara termasuk dalam data primer. Data primer dalam penelitian ini meliputi: wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat

langsung dalam proses pelaksanaan BUMG dalam pengembangan gampong wisata yaitu Kepala BUMG sebagai key informan, Pengelola BUMG Manee Kareung sebagai informan, staf BUMG sebagai informan kunci dan masyarakat sekitar sebagai informan. Sementara itu, buku, jurnal, website instansi terkait, dan dokumen arsip BUMG bersifat sekunder sumber data yang diperoleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pariwisata adalah jalan utama relaksasi dan hiburan untuk orang modern. Karena pemandangan alamnya yang indah, rasa lokal yang kuat, dan budaya rakyat yang beragam, pariwisata pedesaan adalah yang dicari oleh turis di seluruh dunia. Dengan penuh semangat pengembangan desa wisata, beberapa tempat wisata atau wisata tujuan beroperasi dalam mengejar kepentingan jangka pendek, daya dukung lingkungan jenuh atau super, dan itu mengarah pada perusakan lingkungan ekologis, yaitu penurunan lingkungan humanistik, pemborosan sosial sumber daya, dan penurunan kepuasan wisatawan, yang serius mempengaruhi pembangunan jangka panjang dan stabil dari wisata pedesaan (Abdussamad, 2022). Dengan mempopulerkan konsep pembangunan berkelanjutan, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan pengembangan lingkungan wisata, pembawaan kapasitas sumber daya pariwisata dan lingkungan telah menjadi salah satu kriteria untuk menilai pembangunan berkelanjutan pariwisata (Li et al., 2022) dan fokus penelitian desa wisata. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi lingkungan daya dukung desa wisata secara akurat dan memastikan operasinya dalam kisaran daya dukung untuk memastikan perkembangan yang baik dan jangka panjang dari wisata pedesaan (Siahaan & Vuspitasari, 2021).

Pariwisata berkelanjutan memiliki dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Alam adalah sumber daya penting dalam pariwisata. Oleh karena itu, perusakan alam merupakan ancaman bagi pariwisata berkelanjutan di suatu destinasi. Pembangunan kepariwisataan harus memasukkan lingkungan sebagai bagian dari sumber daya kepariwisataan yang perlu dikembangkan dalam jangka waktu tertentu kualitas dan keragamannya namun yang paling penting adalah pariwisata harus memberikan dampak yang baik bagi mata pencaharian masyarakat lokal. Termasuk dalam membantu pengentasan kemiskinan. Sedangkan dari aspek sosial budaya, pariwisata tidak mampu untuk mencegah transformasi budaya ke sisi negatif, memberikan kontribusi untuk pelestarian warisan dan mengembangkan kapasitas/kemampuan masyarakat setempat.

Isu pembangunan pariwisata yang perlu menjadi perhatian semua stakeholders adalah menjaga kelestariannya pariwisata sehingga pariwisata dapat juga dinikmati oleh generasi berikutnya. Pemerintah dengan peraturannya dan masyarakat dengan kepatuhannya terhadap aturan dan regulasi serta kontrol atau check and

balance termasuk partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan(Sutawa, 2012).

Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Tujuan dari community based tourism adalah untuk verifikasi apakah individu, organisasi dan komunitas telah membangun kemampuan mereka untuk mengantisipasi perkembangan pariwisata di daerah mereka di mana komunitas mereka adalah komunitas tinggal. Pengembangan pariwisata tidak akan berhasil tanpa tokoh masyarakat dan semua masyarakat terlibat. Banyak masyarakat lokal menyadari pentingnya pariwisata dalam mendorong perubahan sosial, budaya, dimensi lingkungan dan ekonomi, dimana kegiatan pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Pariwisata tak ubahnya sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mendorong pembangunan ekonomi.

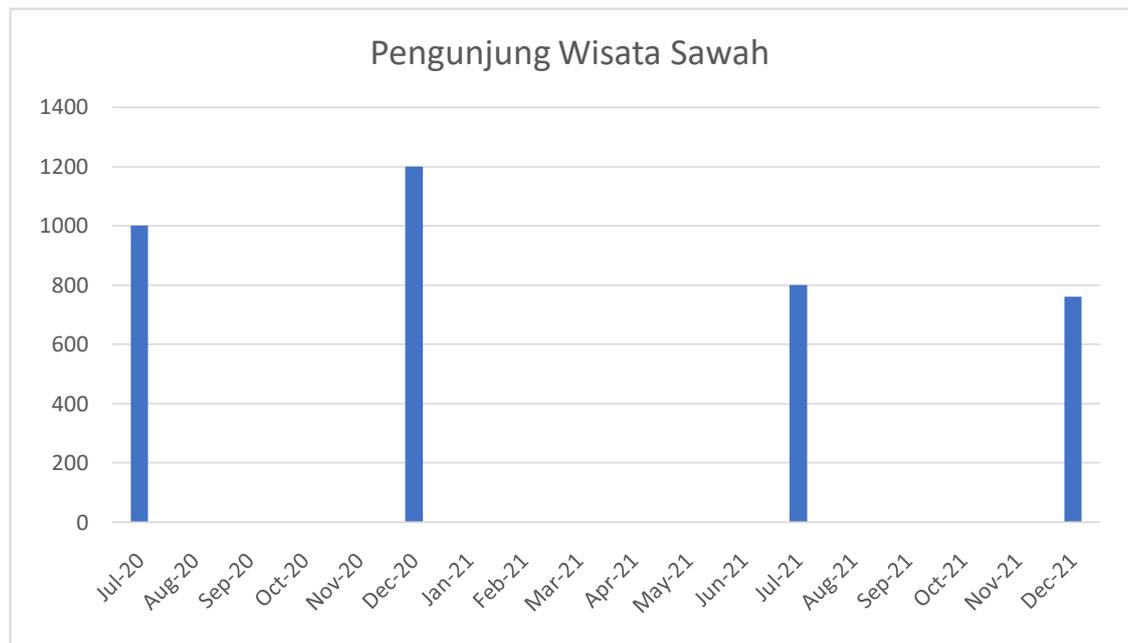
Namun, kelemahan dari tipe kepemimpinan ini adalah ketika seorang pemimpin tidak dapat mengambil keputusan dengan benar, dan ada kontra antara anggota ketika mengambil keputusan membuat tidak terjadi, titik pertemuan hanya berdebat satu sama lain. Pengambilan keputusan juga tidak selalu tepat karena suara terbanyak belum tentu merupakan keputusan terbaik. Selain itu, kepemimpinan tunggal di sebuah organisasi juga memiliki kelemahan yaitu bergantung pada pemimpinnya. Sehingga kegiatan yang dilakukan harus menunggu perintah dari pemimpin. BUMG Manee Kareung mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali dan mengevaluasi setiap paket wisata aktivitas. Pembagian tugas di BUMG Manee Kareung berdasarkan keterampilan atau pengetahuan anggota BUMG. Namun kedepannya akan menyebabkan organisasi BUMG tidak dapat berjalan secara optimal.

Pengelolaan Gampong Wisata tidak dapat dijalankan hanya dengan mengandalkan pendapatan yang dihasilkan dari gampong wisata itu sendiri. Perlu bantuan dari berbagai pihak di luar wisatawan gampong untuk meningkatkan pendapatan desa wisata. BUMG Manee Kareung memiliki kapasitas fungsional dalam aspek kemitraan eksternal, tapi di sini keterbatasan SDM sehingga menjadi kendala untuk mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan wisata.

Kapasitas untuk Meningkatkan Wisata

BUMG Manee Kareung telah mengembangkan potensi wisata menjadi daya tarik wisata yang tidak didapatkan wisatawan. Pengelola desa wisata harus menyadari bahwa desa wisata harus menunjukkan keragaman tempat wisata sehingga tempat wisata tidak terkesan monoton. Penggabungan dari atraksi wisata dapat dilakukan dengan memadukan potensi wisata alam dengan potensi budaya pariwisata. Dalam perkembangannya pengelola Gampong Manee Kareung belum memiliki kapasitas yang sangat baik untuk mengembangkan tempat wisata, terbukti dengan tidak

berkembangnya wisata sawah yang hanya dijadikan spot foto saja. BUMG Manee Kareung memiliki kapasitas fungsional dalam hal promosi Manee Kareung Desa Wisata. Awalnya promosi dilakukan dengan brosur wisata, kemudian promosi Desa Wisata Manee Kareung dilakukan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan blog. Promosi ini juga menemui kendala dari SDM pengelola akun yang terbatas sehingga media sosial terbengkalai. Bukti dari daftar pengunjung wisata yang menurun pada grafik berikut:



Kapasitas masyarakat dalam merintis pengembangan potensi wisata dapat diukur dari parameter masyarakat mengenali jenis potensi yang ada di desanya dan kesadaran masyarakat untuk mengembangkannya potensi tersebut menjadi daya tarik wisata. Kapasitas masyarakat dalam mengenal jenis-jenis pariwisata Potensi yang ada di Gampong Wisata Manee Kareung dapat dibagi menjadi dua tingkatan yaitu, masyarakat yang paham semua potensi yang ada di Gampong Wisata Manee Kareung baik potensi alam maupun potensi budaya, dan kedua, masyarakat yang memahami beberapa potensi Gampong Wisata Manee Kareung. Orang yang mengerti semua potensi alam dan budaya yang ada di Desa Wisata Manee Kareung merupakan anggota BUMG. Sehingga masyarakat yang tidak memahami tidak mendukung fasilitas pengembangan wisata seperti homestay, tempat menjual souvenir dan tempat sampah. Kapasitas individu dalam mengembangkan potensi wisata menjadi daya tarik wisata sesuai dengan kapasitas dan peran individu. Sebagian besar anggota BUMG Manee Kareung tidak

mengetahui tentang pengelolaan desa wisata saat mengikuti BUMG. Untuk meningkatkan kapasitas anggota BUMG Manee Kareung, mereka mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh BUMG maupun oleh Dinas Pariwisata. Hanya saja pelatihan yang tidak dimonitor secara rutin mengakibatkan kapasitas pengelolaan menurun.

Pengetahuan tentang konsep gampong wisata akan mempengaruhi sikap dan pelaku pariwisata dalam mengelola gampong wisata. Pada akhirnya, pengetahuan tentang konsep gampong wisata akan mengarah pada pariwisata aktor untuk menggunakan konsep pariwisata yang dipicu atau tidak. Konsep Gampong Wisata Manee Kareung adalah gampong wisata terpadu. Gampong Wisata Terpadu di Gampong Wisata Manee Kareung, yang mengintegrasikan keanekaragaman jenis wisata yang ada yaitu wisata alam, wisata religi atau wisata budaya, sehingga keanekaragaman jenisnya pariwisata dapat saling mendukung, sehingga nantinya akan muncul kegiatan-kegiatan pariwisata utama yang didukung oleh lainnya kegiatan pariwisata. Kapasitas individu mengenai pengetahuan dan pemahaman konsep gampong wisata tidak fungsional. Hal itu dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang konsep gampong wisata terpadu masih terbatas hanya menyebutkan berbagai potensi wisata namun belum mampu menerapkan konsep terpadu gampong wisata dalam pengembangan Gampong Wisata Manee Kareung. Jadi sekarang, pengembangannya difokuskan pada wisata alam dan wisata budaya. Pengembangan Gampong Wisata Manee Kareung belum terintegrasi berbagai jenis wisata dan potensi yang ada di gampong, seperti homestay, organik, oleh-oleh atau cinderamata, dan konveksi tidak tersedia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, secara umum penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa BUMG Manee Kareung memiliki kapasitas yang tidak efektif untuk kapasitas organisasi dan kapasitas individu. Kapasitas organisasi tidak akan berjalan efektif jika kapasitas individu tidak memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, sebaliknya kapasitas individu tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh kapasitas organisasi.

Kapasitas organisasi dilihat dari kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan oleh Zikram sebagai koordinator lapangan, dan ketua BUMG menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat Manee Kareung tidak berfungsi karena ketergantungan pada pimpinan organisasi dan permasalahan dalam aspek koordinasi.

Dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan pariwisata atraksi serta aspek promosi gampong wisata manajemen organisasi belum menunjukkan kapasitas fungsional. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian dari Pemerintah dan pengelola gampong wisata yaitu penerapan konsep gampong wisata terpadu. Terintegrasi gampong wisata diharapkan dapat mengintegrasikan potensi wisata alam, potensi wisata budaya, dan potensi gampong seperti homestay dan oleh-oleh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang belum digali dalam penelitian ini karena berbagai keterbatasan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, terutama mengenai kapasitas kelembagaan di tingkat sistem. Pada tingkat sistem, penelitian pada hubungan antara individu, kelompok informal, dan organisasi formal yang menghasilkan modal sosial dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Gampong terkait dengan pengembangan gampong wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J. (2022). *implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di desa bototonuo kabupaten bone bolango | Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/299>
- Adejumo, O. O., Asongu, S. A., & Adejumo, A. V. (2021). Education enrolment rate vs employment rate: Implications for sustainable human capital development in Nigeria. *International Journal of Educational Development*, 83(March 2020), 102385. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102385>
- Disbudpar Aceh Gelar Pelatihan Desa Wisata di Kota Lhokseumawe*. (n.d.). Retrieved October 30, 2022, from <https://disbudpar.acehprov.go.id/disbudpar-aceh-gelar-pelatihan-desa-wisata-di-kota-lhokseumawe/>
- Fatimah, A. S. (2021). pengembangan kapasitas pengelola badan usaha milik desa (Bumdes) di desa cilumba kecamatan cikatomas kabupaten tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1), 40–62. <http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/58>
- Gilang, M. I., Maryuni, Y., & Lindawati, Y. I. (2021). Locality Development Model: Analysis on Community Strength in Planning Business Capacity Development in Panyabangan Village Based on Local Potentials Historical Buildings of Bendungan Lama Pamarayan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 747(1), 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012015>
- Hagelsteen, M., Gutheil, J., Morales Burkle, M. D. M., & Becker, P. (2022). Caught between principles and politics: Challenges and opportunities for capacity development from governmental donors' perspectives. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 70, 102785. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2022.102785>
- Hasyem, M., & Ferizaldi. (2022). Community Development Based on Local Wisdom. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social*

- Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021)*, 648, 137–142. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.220302.021>
- Junita, A., Andiny, P., Meutia, T., Samudra Langsa, U., & Langsa, B. K. (2022). increasing the capacity of gampong's business entity (BUMG) in an effort to improve community welfare in langsa city. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, 2(4), 569–578. <https://doi.org/10.54443/IJEBAS.V2I4.365>
- Li, L., Ye, X., & Wang, X. (2022). Evaluation of Rural Tourism Carrying Capacity Based on Ecological Footprint Model. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/4796908>
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola apbdes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349–362. <https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V8I2.244>
- Siahaan, S. V. br, & Vuspitasari, B. K. (2021). peran kepala desa dalam mewujudkan pendapatan asli desa sebente melalui kegiatan bum desa setanga lestari. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 202–214. <https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V8I2.250>
- Stojic, S., & Salhofer, S. (2022). Capacity Development for Plastic Waste Management—A Critical Evaluation of Training Materials. *Sustainability 2022, Vol. 14, Page 2118, 14(4)*, 2118. <https://doi.org/10.3390/SU14042118>
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5)
- Veronica Siahaan, S., Penggunaan Dana Desa, S., Bina Taruna Gorontalo, U., Veronica br Siahaan, S., & Niaga Atlantika, Y. (2022). strategi penggunaan dana desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan bum desa pasti jaya abadi desa pasti jaYA. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 611–626. <https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V9I3.462>
- Zakaria, M., Jalil, S. M., Trisna, T., & Zuraida, Z. (2022). Identification of Potential for Increasing the Business Scale of BUMG Pulo Makmue with the AHP Method. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 2(1), 84–93. <https://doi.org/10.52088/IJESTY.V2I1.207>